

Warga Minta Kabel Semrawut Sisa Tiang Dicabut di Pecenongan Dirapkan

JAKARTA (IM) - Kabel di Jl Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus) jadi lebih semrawut usai tiang miring dicopot. Warga sekitar meminta agar petugas menyelesaikan pekerjaan perapian kabel.

Menurut pengakuan warga, tiang miring di depan Palang Merah Indonesia (PMI) dicabut pada Rabu (29/6). Setelah itu, kabel-kabel masih semrawut. Bahkan, kondisinya jadi lebih parah. Jika sebelumnya tidak menjuntai ke tanah, kini untaian kabel menyentuh tanah.

Salah seorang warga bernama Pendi (60), menyayangkan kondisi kabel-kabel semrawut tersebut. Dia mengaku ngeri dan takut ada kecelakaan negara kabel yang menjuntai sampai tanah itu.

"Ngeri juga takutnya macam ada orang, takut ada kesetrum takut apa gitu," kata Pendi saat ditemui di depan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) di Jl Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

"Ini kan kabelnya masih semrawut coba kalau ke ini, (ada orang) keiket banyak yang jatuh kali, semrawut kayak gini kan takutnya ya kena orang yang lewat," lanjutnya.

Dia berharap kabel semrawut di Jl Pecenongan itu segera ditangani. Dia menyebut kabel-kabel utilitas yang tidak berfungsi seharusnya segera dipotong agar tak menambah jantainya kabel yang semrawut. "Makanya cepet buru-buru dicabut lagi lah dihilangin kalau nggak berfungsi," ucapnya.

Warga lainnya yang merupakan pedagang bakso yang selalu mangkal di kawasan Jl Pecenongan, Widy (40) mengungkap hal yang sama dengan Pendi. Dia menyebut tiang miring penyangga kabel semrawut itu dicabut Rabu (29/7) lalu oleh 5 petugas.

"Kalau petugasnya cuma yang nyabut cuman petugas PLN kayaknya, ada 5 (orang), siang jam 14.00 WIB-an," kata Widy.

Senada dengan Pendi, Widy menyebut kabel utilitas yang menjulur hingga me-

nyentuh tanah di depan gedung PMI tersebut sudah ada sejak pencabutan tiang miring dilakukan. Menurutnya, ada pula pelanggan bakso nya yang mengeluh takut karena banyaknya jantainya kabel tersebut.

"Dari tiang dicabut itu, dari pertama kan tiang belum dicabut pertama dipotongin kabel ini dulu, habis itu ya sampai sekarang udah semrawut gitu kabelnya nggak diberes-beresin," ujarnya.

Widy berharap kondisi kabel-kabel semrawut di Jl Pecenongan, Jakarta Pusat itu tidak dibiarkan terlalu lama. Dia berharap penataan segera dilakukan.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Binamarga Jakarta Pusat (Jakpus), Agustio Ruhseto menyebut kabel semrawut di Jl Pecenongan, Jakarta Pusat (Jakpus), bakal tertibkan. Jantainya kabel-kabel yang menempel pada tiang penyangga miring di depan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) itu bakal dipotong.

"Untuk penanganan jangka pendek terhadap kabel udara yang semrawut di Jl Pecenongan, Jakarta Pusat, rencananya akan dilakukan penertiban/pemotongan kabel udara pada titik yang terdapat tiang utilitas yang miring dalam waktu sesegera mungkin," kata Kasudin Binamarga Jakarta Pusat Agustio Ruhseto saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/6).

Agustio mengatakan pemotongan kabel semrawut itu bakal dilakukan sesegera mungkin. Sedangkan tiang penyangga yang kini tidak lagi berdiri kokoh itu bakal dicabut. Lebih lanjut dia mengatakan Dinas Binamarga juga telah mempersiapkan penanganan jangka panjang kabel semrawut tersebut.

Dia menyebut kabel-kabel itu bakal masuk dalam proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). "Saat ini SJUT sedang dalam proses pembangunan oleh BUMD penugasan, yaitu PT. Sarana Jaya," katanya. ● yan

Pemkab Bekasi Targetkan 2500 Rutilahu Rampung di Tahun 2022

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Pj, Bupati Bekasi, Dani Ramdan (dua kanan) saat meninjau bantuan Rutilahu di Kampung Bulak Kuniyit, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Selasa (5/7).

CIBITUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan pemberian bantuan perbaikan bagi 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi selesai.

Pada tahun ini, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengatakan saat ini sudah 2.020 Rutilahu yang sudah dibangun Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

"Target Rutilahu 2.500 unit dan akan diselesaikan Insya Allah di tahun ini. Sekarang yang terbangun sudah 2.020 unit, jadi masih ada 480 unit yang masih dalam proses. Mudah-mudahan di akhir tahun sudah terbangun semua," ujarnya saat meninjau 3 bantuan Rutilahu di Kp. Bulak Kuniyit, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Selasa (5/7).

Dengan didampingi Plt. Disperkimtan Nur Chaidir, Dani menyampaikan bahwa sudah dilakukan pembangunan pada 20 rumah di Desa Muktiwari.

Bantuan Rutilahu itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat agar memiliki rumah layak huni.

"Rutilahu ini ada 20 unit, tadi sudah 3 yang saya lihat dan memang itu adalah untuk keluarga-keluarga yang tidak dimungkinkan secara ekonomi untuk memperbaiki rumahnya dan kita bangun supaya hidupnya lebih sehat. Ini juga dalam rangka mencegah stunting

di samping masalah-masalah gizi," katanya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (5/7) malam.

Dirinya menambahkan, pembangunan Rutilahu itu salah satu program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dirinya juga mengajak dunia usaha, yayasan-yayasan, maupun dinas lain untuk melakukan gerakan serupa.

"Saya kira memang ini program yang terasa ke masyarakat manfaatnya, harus lebih banyak program pemerintah seperti ini. Saya juga mengajak dunia usaha, yayasan-yayasan, Baznas, untuk menyumbang Rutilahu seperti ini. Jadi kalau semua masyarakat Kabupaten Bekasi, MCK nya sehat, hidupnya sehat, biaya kesehatan menurun, ekonomi meningkat," tambahnya.

Tak hanya itu, dalam kunjungannya ke Desa Muktiwari, Dani Ramdan juga menyempatkan diri untuk melihat pelaksanaan pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di beberapa rumah penerima bantuan.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memfasilitasi pembangunan SPALD-S untuk rumah tangga yang kurang mampu dalam membuat MCK secara pribadi.

"Kunjungan itu di RT 02/RW 04, dalam rangka meninjau pekerjaan area SPALD-S, ada toilet, septic tank, untuk rumah tangga-rumah tangga miskin yang tidak mampu membuat MCK nya sendiri," jelasnya. ● mdl

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PIALA FIBA ASIA 2022 DIPAMERKAN DI MONAS
Warga memotret trofi Piala FIBA Asia 2022 yang sedang di pamerkan di area Monas, Jakarta, Rabu (6/7). Trofi Piala FIBA Asia 2022 akan dipamerkan di beberapa lokasi di Jakarta dalam rangkaian tur trofi pada 5-9 Juli sebagai sosialisasi ke masyarakat agenda kejuaraan bola basket Piala FIBA Asia 2022 yang digelar di Jakarta pada 12-24 Juli.

Atasi Banjir, Pemprov DKI Kejar Target 4 Waduk Baru Selesai Bulan Depan

Untuk pembangunan waduk sendiri nantinya dapat menampung sekitar 377 meter kubik air khususnya di Waduk Brigi yang saat ini tengah dikerjakan. Nantinya bisa reduksi banjir sekitar 20 persen. Yang biasa daerah kemang banjir, mudah-mudahan dengan pembangunan itu dapat berkurang.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 4 waduk baru atasi masalah banjir di Jakarta akan rampung pada bulan Agustus mendatang.

Kepala Seksi Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA Jakarta, Maman Supratman mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini terus memaksimalkan pengerjaan proses pembangunan waduk.

"Ini yang kita kebut ada 4 lokasi di DAS Kerukut, Waduk Brigi, Lebak Bulus, Pondok Rangan sama Wirajasa. Target pembangunan sendiri kita berdasarkan kontrak sampe

bulan Oktober, tapi kita kejar secara maksimal mungkin bisa selesai di Bulan Agustus bulan ini," ujarnya kepada wartawan di sela sesi acara "Pemanfaatan Solusi Berbasis Alam untuk Warga Jakarta" yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia di Hotel Wisten, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kejar target sendiri dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan banjir di Jakarta apabila masuk dalam musim penghujan.

"Ini sedang kita kejar target pembangunannya itu bertujuan untuk mengurangi debit dari air kali Kerukut, Kali Sunter dan kita harapkan dapat

maksimal dalam waktu menghadapi musim hujan," jelasnya.

Untuk pembangunan waduk sendiri nantinya dapat menampung sekitar 377 meter kubik air khususnya di Waduk Brigi yang saat ini tengah dikerjakan. "Nantinya bisa reduksi banjir sekitar 20 persen. Yang biasa daerah kemang banjir, mudah-mudahan dengan pembangunan itu dapat berkurang," pungkasnya.

Normalisasi Kali

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih terus melakukan pengerjaan rumah berupa normalisasi kali besar maupun kecil di beberapa titik di wilayah Jakarta.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya banjir dan genangan yang berada di titik-titik Ibukota.

"Terkait Normalisasi sungai kita sekarang lebih kepada penataan. Selain itu ada dua lokasi yang sekarang sedang on going penataan yakni Kali Pasar Baru dan Kali Ciliwung Pasar Baru (Muara Angke) itu sekarang sedang kita kerjakan, kata Kepala Seksi Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA Jakarta, Maman Supratman.

Pemkot Siapkan Dana Pendidikan Bagi Siswa yang Gagal Masuk Negeri

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota Depok menyiapkan dana bantuan bagi peserta didik yang gagal masuk SD, SMP, SMA, SMK negeri di wilayahnya. Namun, khusus untuk keluarga tak mampu saja. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan pihaknya sangat mendukung keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan dana bantuan pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan SMA yang gagal masuk ke sekolah negeri. Namun dijelaskan bantuan pendidikan itu cuma diberikan bagi peserta didik kategori tertentu yang salah satunya adalah yang tidak mampu.

Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Besar subsidi tiap jenjang berbeda. Untuk siswa SD sebe-

sar Rp2 juta, SMP Rp 3 juta dan SMA Rp2 juta per orang.

"Diberikan pada siswa tidak mampu agar bisa tetap bersekolah di swasta," kata Supian Suri, Rabu (6/7). Program ini, menurut dia sudah berjalan beberapa waktu lalu. Yang membedakan, pengajuan bantuan dilakukan oleh sekolah. Bantuan pendidikan yang bersifat bantuan sosial ini adalah penyempurna dari program sebelumnya.

"Bahkan Pemkot Depok juga sudah memberikan semacam tambahan honor untuk guru swasta yang di sekolah tersebut terdapat siswa kategori miskin," ujarnya.

Bantuan pendidikan ini berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alokasi anggaran diambil dari APBD daerah. "Ini bantuan dari Pemkot Depok, bukan BOS. Ini memang alokasi anggaran khusus dari kami di Pemkot Depok un-

tuk warga yang kurang mampu," ucapnya.

Siswa penerima bantuan ditentukan berdasarkan parameter yang ada di Peraturan Wali Kota Depok tentang Kemiskinan. Sumber kedua adalah data dari DTKS dan non DTKS.

"Dari data tersebut yang akan kita verifikasi apakah mereka bisa terima bantuan pendidikan atau tidak. Data tersebut sudah ada di Dinas Sosial. Kalaupun ada data usulan atau baru atau belum masuk silakan diajukan melalui RT RW untuk disampaikan nanti diverifikasi terhadap usulan tersebut," bebernya.

Untuk diketahui berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Depok jumlah lulusan SD yang tidak diterima di SMP negeri di Kota Depok mencapai 25.804 orang. Sedangkan lulusan SMP negeri sederajat yang tidak terampung di SMA/SMK negeri sebanyak 30.900 orang. ● yan



PELUNCURAN REY STARTUP MEMBERSHIP KESEHATAN

Chief Business & Co-Founder Rey, David Nugroho (kiri), CTO & Co Founder Rey, Bobby Siagian (kedua kiri), CEO & Co-Founder Rey, Evan Tanotogono (kedua kanan), VP Product & Co-Founder, Rosi Setyo Nugroho (kanan), menunjukan Rey Startup Insurtech saat peluncuran membership Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/7). Rey, startup insurtech kesehatan yang pertama terintegrasi di Indonesia tersebut merilis produk-produk asuransi eksklusif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan terproteksi.

Kemendagri: Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Penularan

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri menyebut wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah melewati puncak penularan Covid-19. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus Covid-19 di Jabodetabek memang meningkat. Namun kini sudah mulai melandai.

"Dalam satu minggu terakhir kami melihat terjadi tren pelandaian yang mengindikasikan wilayah aglomerasi Jabodetabek telah melewati puncak (penularan)," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Syafrizal saat dihubungi, Rabu (6/7).

Tren pelandaian ini lah yang kemudian membuat Kemendagri kembali mengubah status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek dari level 2 ke level 1 hanya dalam waktu satu hari.

Syafrizal mengatakan, berdasarkan indikator transmisi komunitas, wilayah aglomerasi Jabodetabek memang seharusnya masih masuk dalam kategori level 2. Oleh karena itu, Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (5/7) kemarin menerbitkan Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 yang menetapkan Jabodetabek

berstatus PPKM level 2. Namun, Kemendagri menyadari telah terjadi tren penurunan kasus dalam sepekan terakhir di ibu kota dan sekitarnya.

Dengan perkembangan tersebut, Kemendagri pun memperkirakan wilayah aglomerasi jabodetabek dapat kembali ke level 1 dalam satu atau dua pekan ke depan. "Setelah melakukan review dan asesmen terhadap kondisi tersebut, mengingat inmendagri akan berlalu selama 1 bulan, dengan pertimbangan kasus yang sudah mulai melandai dan diperkirakan akan kembali ke level 1, serta tingkat rawat inap dan kematian yang masih rendah dan terkendali, kami memutuskan untuk merevisi level PPKM wilayah aglomerasi menjadi level 1," kata Syafrizal.

Mendagri Tito Karnavian pun kembali menerbitkan Inmendagri terbaru nomor 35 Tahun 2022 sebagai payung hukum perubahan status PPKM Jabodetabek ke level 1.

Syafrizal menegaskan, langkah perubahan ini dilakukan untuk tetap menjaga aspek kesehatan dengan memperhatikan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Aturan terbaru itu berlaku dari 6 Juli hingga 1 Agustus 2022. ● yan

Distamhut DKI Jakarta Bakal Bangun Taman Seperti Tebet Eco Park

JAKARTA (IM) - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta berencana membuat taman seperti Tebet Eco Park di tempat lain. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Taman Distamhut DKI Jakarta, Hendrianto mengatakan hal itu juga diusulkan oleh DPRD DKI, agar ruang terbuka hijau atau RTH tidak hanya dibangun di wilayah selatan Jakarta saja.

"Mungkin dulu membuat keputusan tidak kepikiran itu, apa sih bikin taman. Sekarang sudah mulai berpikir ternyata konsekuensinya adalah saya suka taman begitu," ujar dia di acara media briefing dengan tema Pemanfaatan Solusi Berbasis Alam untuk Warga Jakarta di The Westin, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/7).

Kini taman seperti Tebet Eco Park diharapkan ada di masing-masing wilayah kota. Namun, skalanya mungkin tidak sebesar taman di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan itu. "Sebenarnya dari tahun sebelumnya kita sudah create taman-taman kecil, itu skalanya taman maju bersama. Cara pendekatan berfikirnya memang sama, nature based solution," tutur Hendrianto. "Tapi mungkin tidak sekompleks Tebet Eco Park."

Masyarakat inginnya semua fasilitas ada, sehingga tidak harus berpindah tempat. Di Tebet Eco Park, pengunjung tidak perlu berpindah tempat, ada picnic table, ada tempat bermain di playground, MV

Theater juga tersedia jika ingin ada acara musik.

"Warga tuh pengennya komplit satu tempat jadi one stop service. Kalau taman kecil kan harus berpindah mereka, mungkin untuk fasilitas uniknya apa, kalau mau menikmati lainnya tinggal pindah kemana misalnya, tapi itu hal yang tidak biasa di warga kita," kata dia.

Hendrianto memastikan bahwa taman yang skalanya lebih kecil sedang dibangun, sehingga masyarakat tidak hanya bisa berwisata di Tebet Eco Park.

Untuk taman yang skalanya sama dengan Tebet Eco Park, kata dia, itu menjadi pekerjaan rumah dan catatan bagi Distamhut DKI. Menurut dia, Pemprov DKI juga ingin ada taman serupa di utara, timur, barat, dan lainnya. "Yang ada di program kita salah satunya Waduk Cicin ya rencananya. Tapi ini masih proses, mudah-mudahan bisa dilancarkan sesuai dengan planning kita, itu sih," ujar Hendrianto. ● yan

PENGUMUMAN

PT ARKARA PRATHAMA ENERGI ("Persoran"), dengan ini mengumumkan bahwa Persoran telah diambil alih oleh 2 (dua) pemegang saham baru yang terafiliasi.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 7 Juli 2022

Direksi
PT ARKARA PRATHAMA ENERGI
Satrio Tower Lantai 10,
Jln. Prof. Dr. Satrio Blok C 4 Nomor 5,
Jakarta Selatan